

# PARAMEDIA

JURNAL KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEAGAMAAN

**Otentisitas Mushaf Al-Qur'an Telaah atas Pemikiran John  
Wansbrough)**

*Edi Susanto*

**Misteri Alam Jin Perspektif Al-Qur'an**

*Aswadi*

**Kepribadian Muslim Ideal Perspektif Al-Qur'an (Telaah Konsep  
Hamka Tentang Kepribadian Muslim dalam Tafsir Al-Azhar)**

*Abd. Kholid*

**Fitrah Manusia dalam Al-Qur'an dan Pengembangannya Melalui  
Life Skill Education**

*Ali Mas'ud*

**Pakaian dan Permasalahannya Menurut Wawasan Al-Qur'an**

*Ahmad Saiful Anam*

**Multicultural Mission: Islamic Indigenization in Chinese Culture**

*Mohammad Ali*

**Negara dan Agama dalam Pandangan Mustafa Kemal**

*Muhammad Salik*

LEMBAGA PENELITIAN IAIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

# PARAMEDIA

## Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan

---

### **Pemimpin Redaksi**

*H. A. Saiful Anam*

### **Wakil Pemimpin Redaksi**

*Bambang Subandi*

### **Sekretaris Redaksi**

*H. Fachrur Rozie Hasy  
Syaikhul Amin*

### **Penyunting Ahli**

*H. M. Ridwan Nasir  
H. Imam Bawani  
H. Thoha Hamim  
H. Saidun Fiddaroini  
H. Nur Syam*

### **Penyunting Pelaksana**

*Achmad Zaini  
Saiful Jazil  
Biyanto  
Jeje Abdul Rozak  
Amiq  
Masdar Hilmy  
Khoirun Ni'am*

### **Sekretariat**

*Rijalul Faqih  
Sahuri  
Ruhayati  
M. Syaeful Bahar  
Amirullah  
Emy Tyartiani  
Abdul Halim  
Imampuri*

---

**Jurnal Paramedia** pertama kali terbit pada bulan April 2000, dan terbit empat kali setahun. Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel dengan Rektor sebagai pelindung dan Pembantu Rektor 1 sebagai pengarah.

---

**Alamat Penerbit/Redaksi:** Pusat Penelitian IAIN Sunan Ampel, Jl. A. Yani 117 Surabaya (60237), Telp. (031) 8410298 Ps. 30, Fax. (031) 8413300  
E-Mail: sunanampel@surabaya.wasantara.net.id  
Homepage: <http://www.geocities.com/hotsprings/6774>

# DAFTAR ISI

Editorial (i)

Pedoman Transliterasi (ii)

Daftar Isi (iii)

- **Otentisitas Muṣḥaf Al-Qur'ān Telaah atas Pemikiran John Wansbrough)**  
*Edi Susanto ( 198- 211 )*
- **Misteri Alam Jin Perspektif Al-Qur'an**  
*Aswadi ( 212- 223 )*
- **Kepribadian Muslim Ideal Perspektif Al-Qur'an (Telaah Konsep Hamka Tentang Kepribadian Muslim dalam Tafsir Al-Azhar)**  
*Abd. Kholid ( 224- 235 )*
- **Fitrah Manusia dalam Al-Qur'an dan Pengembangannya Melalui *Life Skill Education***  
*Ali Mas'ud ( 236- 250 )*
- **Pakaian dan Permasalahannya Menurut Wawasan Al-Qur'an**  
*Ahmad Saiful Anam ( 251- 264 )*
- **Multicultural Mission: Islamic Indigenization in Chinese Culture**  
*Mohammad Ali ( 265- 282 )*
- **Negara dan Agama dalam Pandangan Mustafa Kemal**  
*Muhammad Salik ( 283- 300 )*

# NEGARA DAN AGAMA DALAM PANDANGAN MUSTAFA KEMAL

*Mohammad Salik<sup>1</sup>*

**Abstract:** Mustafa Kemal is a controversial Turkey's modernist. He is known as the founder of Modern Republic of Turkey based on new political vision after the fall of Usmani Emperor. In founding a modern state, he tried to separate religion from politics. This is underlain by the historical experience that religion often hindered modernization efforts and progress, because it was abused by the power holders. The separation of religion from state affairs was not intended to eliminate Islam from Turkey but to minimize the role of *ulama* who were incapable of giving security and pride to Turkey nation. In Kemal's view, Islam is a rational religion, but its rationality was destroyed and abused. Therefore, religion should be reinterpreted so that it becomes the source of enlightening and capable of freeing the nation from ignorance.

**Kata Kunci:** Agama, Negara, Mustafa Kemal, Sekularisasi

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya

## Pendahuluan

Sekularisasi adalah sebuah proses. Sekularisasi dalam konteks ini berarti transformasi dari sebuah negara agama menuju kepada negara sekuler. Dalam hal ini Smith<sup>2</sup> menjelaskan bahwa secara garis besar sekularisasi ditandai oleh, (1) pemisahan antara pemerintahan dan ideologi-ideologi keagamaan dan struktur-struktur kegerejaan, (2) pengembangan pemerintahan untuk melaksanakan peranan mengatur lapangan sosio-ekonomis yang dulu dilakukan oleh struktur-struktur keagamaan, (3) transvaluasi budaya politik untuk menekankan tujuan-tujuan duniawi yang non-transenden dan cara-cara yang rasional dan pragmatis, yang berupa nilai-nilai politik sekuler. (4) Dalam bentuknya lebih radikal lagi, kekuasaan pemerintah terhadap keyakinan-keyakinan agama, peribadatan dan struktur-struktur keagamaan.

Dalam sebuah modernisasi, agama memiliki peran yang sangat besar. Secara historis, dengan tanpa mengabaikan faktor yang lain, seperti ras, ekonomi dan sosial, agama telah menjadi faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya berbagai konflik. Perancis, sebagai misal, agama menjadi isu penting dalam perdebatan dan kontroversi politik sejak revolusi. Oposisi sengit kalangan anti agama terhadap bantuan pemerintah kepada sekolah-sekolah agama menjadi pemicu perpecahan dalam masyarakat Perancis. Di Belanda, perbedaan-perbedaan agama mengakibatkan pembagian masyarakat Belanda secara ekstrim. Di Burma, politisasi agama oleh perdana Menteri UNU – yang secara resmi mengumumkan Buddhisme Therevada sebagai agama negara pada 1961 – mengakibatkan meletusnya kekacauan komunal antara umat Budha dengan umat Islam. Di Asia Selatan, perbedaan agama dan budaya yang diperkuat oleh pertimbangan ekonomi dan politik telah mengarah kepada pemisahan masyarakat Hindu dan Muslim dan terbentuknya Pakistan pada tahun 1947.<sup>3</sup> Di Mesir, reaksi Islam terhadap modernisasi terungkap melalui gerakan Al Ikhwan al Muslimin yang didirikan pada tahun 1928 oleh Hasan al-Banna. Gerakan ini timbul atas keprihatinan al-Banna melihat bentuk

---

<sup>2</sup> Donald Eugene Smith, *Agama dan Modernisasi Politik*, ter. Machnun Husen, (Jakarta: CV. Rajawali), 115-116

<sup>3</sup> Binnaz Toprak, *Islam dan Perkembangan Politik di Turki*, terj. Karsidi Diningrat R. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 28-31

pengaruh modernisasi sekuler Barat pada nilai-nilai Islam.<sup>4</sup> Di Pakistan, sebuah organisasi yang dipelopori oleh Al-Maududi bersama beberapa aktifis Muslim dan ulama muda pada awal tahun 1940-an, dengan gigih telah mendesak pemerintah Pakistan agar menjadikan syariat Islam sebagai hukum dasar bagi Pakistan. Semua contoh di atas menunjukkan bahwa peran agama adalah besar dalam kebijakan modernisasi, walaupun dampaknya berbeda antara satu dengan lainnya.

Mustafa Kemal sebagai salah satu tokoh pembaharu Turki memiliki pengalaman tersendiri di dalam mengadakan pembaharuan. Dalam sejarah perkembangan pemikiran modern di dunia Islam, ia tercatat sebagai tokoh pertama yang menerapkan sistem pemerintahan modern Barat di negeri muslim. Ia terkenal sebagai pendiri Republik Turki modern dari reruntuhan imperium Usmani berdasarkan visi politik baru. Pada tingkatan konstitusional, Mustafa Kemal menegaskan hubungan antara negara dan agama dengan cara yang berbeda dan lebih radikal dibanding dengan para pembaharu muslim lainnya. Pendekatannya yang rasional terhadap agama dan keinginannya untuk menciptakan sebuah negara modern membawa ide-idenya bersesuaian dengan paradigma sekularis. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya pemikiran-pemikiran Mustafa Kemal mengenai hubungan antara negara dan agama? Adakah keterkaitan antara pemikiran Mustafa Kemal dengan latar belakang sosio-politiknya? Bagaimana dampak dan reaksi-reaksinya atas pembaharuan Mustafa Kemal? Kiranya perlu kajian yang lebih mendalam untuk menjawab permasalahan tersebut.

### **Biografi Mustafa Kemal**

Mustafa Kemal Atatürk<sup>5</sup> lahir di Salonika pada tahun 1881, sebuah kota yang kini menjadi salah satu kota besar di Yunani. Ibunya bernama Zubeyde dan ayahnya adalah Ali Reza, salah seorang pegawai biasa pada

---

<sup>4</sup>Lihat Manfred Halpern, *The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa* (Princeton: University Press, 1963), 134-150.

<sup>5</sup> Nama aslinya adalah Mustafa. Nama *Kemal* yang berarti sempurna diberikan oleh gurunya ketika ia belajar di Semsî Efendi School, karena namanya sama dengan nama gurunya. Adapun nama *Atatürk* (berarti Bapak Turki) adalah gelar yang diberikan oleh Majelis Nasional Agung atas prestasi dan dedikasinya terhadap bangsa. Lihat *The Turkish Ministry of Press Broadcasting and Tourism, Gazi Mustafa Kemal Atatürk of The Turkish Republic* (Istanbul: Dizerkonca Matbası, 1961), 11-15.

sebuah kantor pemerintah di kota itu. Sebagai seorang yang taat beragama, sang ibu menginginkan agar anaknya menjadi orang yang taat beragama pula, dan setidaknya menjadi seorang *hafidz* (hafal al-Qur'an) atau seorang *hoja* (guru atau ustadz).<sup>6</sup> Oleh karena itu ia memasukkan anaknya ke sebuah madrasah, yaitu madrasah Fatimah Kadr. Namun, karena tidak merasa senang belajar di sana, ia selalu membantah dan melawan gurunya bahkan ia sering membolos. Akhirnya ia dimasukkan di *Semsi Efendi*, sebuah lembaga swasta yang berpendidikan modern pertama di Selonika.<sup>7</sup>

Pada tahun 1883 ia masuk ke sekolah Latihan Militer di Monastir dan tamat pada tahun 1899. Di masa belajarnya ia dikenal sangat cerdas. M. Syafi'i Anwar menulis bahwa selama masa pendidikannya ia menunjukkan prestasi yang cemerlang, baik di bidang politik, sejarah, sastra dan terutama pada matematika. Di antara tokoh-tokoh yang dikaguminya adalah Napolion Bonaparte (di bidang Militer). Di bidang pemikiran filsafat dan sejarah ia sangat banyak membaca karya-karya John Stuart Mill, Rosseau, Voltaire, Auguste Comte, Montesquieu dan lain-lain.<sup>8</sup>

Setelah menyelesaikan sekolah Latihan Militer, Mustafa Kemal memasuki Sekolah Tinggi Militer di Istanbul.<sup>9</sup> Masa studi di Istanbul ini adalah merupakan masa meluasnya tantangan terhadap kekuasaan absolut Sultan Abdy Hamid II (1842 – 1918).<sup>10</sup> Mustafa-pun mengorganisir kelompok-kelompok penentang Sultan, antara lain dengan mengadakan

---

<sup>6</sup> Lihat H. A. R. Gibb, "Ataturk, Mustafa Kemal", dalam *The Encyclopedia of Islam*, I, 1989, 85. Lihat juga Bernard Lewis, *The Emergency of Modern Turkey* (London: Oxford University Press, 1968), 243.

<sup>7</sup> Lihat J. R. Walsh, "Ataturk, Mustafa Kemal", dalam *Encyclopedia International*, II, 1977, 147.

<sup>8</sup> Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), 143. Bandingkan dengan M. Syafii Anwar, "Kemalisme dan Iskam, sebuah Kaleidoskop," dalam *Ulumul Qur'an*, 1, 3, 1989, 85.

<sup>9</sup> Lihat Syafiq A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 145.

<sup>10</sup> Pada masa pemerintahan Abdul Hamid II antara tahun 1876 – 1909) ditandai dengan rongrongan serangan dari orang-orang Eropa yang menuntut pelepasan diri dari kekuasaan Turki Usmani. Demikian juga pada saat ini, memuncaknya gerakan-gerakan dalam negeri yang berupaya merubah bentuk dan sistem pemerintahan Turki Usmani. Lihat J. Deny "Abd. Al-Hamid II" dalam *The Encyclopedia of Islam*, I, 1960, 63-64. Lihat juga Harun Nasution, *Pembaharuan*., 143.

rapat-rapat gelap, menerbitkan pamflet-pamflet dan lain-lain. Karena kegiatannya itu ia bersama rekan-rekannya pernah dipenjarakan selama beberapa bulan di buang di Siria.<sup>11</sup>

Pada tahun 1906, ia mendirikan sebuah organisasi rahasia yang diberi nama *Vatan* (tanah air). Tetapi organisasi ini tidak dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan, karena penduduknya didominasi oleh bangsa Arab dan terletak agak jauh dari Istanbul. Oleh karena itu secara rahasia ia kembali ke Salonika selama empat bulan dan mendirikan cabang organisasi ini di sana. Namanya diperluas menjadi *Vatan ve Hurriyet* yang berarti Tanah Air dan Kemerdekaan. Organisasi ini kemudian menggabungkan diri dalam Komite Persatuan dan Kemajuan.

Pada tahun 1908 Mustafa Kemal mendapat kesempatan mengunjungi Libya dalam kapasitasnya sebagai utusan Turki Muda. Adapun tugas utama Mustafa Kemal adalah untuk mengamati perkembangan sosial, politik dan keamanan daerah tersebut.<sup>12</sup> Mustafa Kemal melihat bahwa yang menjadi permasalahan bagi masyarakat Turki Usmani tak jauh berbeda dengan masyarakat Libya yakni adanya kesan bahwa gerakan Turki Muda kelihatan berupaya menyisihkan agama. Di sini ia berupaya menakutkan masyarakat tentang ketidakbenaran anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa Turki Muda sama sekali tidak beroprasi kepada syari'at.<sup>13</sup> Hal ini sangat besar pengaruhnya bagi kepercayaan rakyat Libya pada gerakan Turki Muda. Terbukti bahwa di antara pendukung fanatik Mustafa Kemal dari kalangan pemuka-pemuka agama di Libya di antaranya adalah Syekh Ali Hayat Efendi, Kepala Pengadilan Tinggi Syari'at di Tripoli.<sup>14</sup>

Pada tahun 1918, Istanbul merupakan tempat kegiatan politik yang hebat. Beberapa partai politik aktif, masing-masing menawarkan programnya demi keselamatan Turki dan masing-masing memiliki aspirasi nasional. Mereka mengamcam Partai Kesatuan dan Kemajuan yang kebijakannya telah membuktikan kegagalannya dalam perang besar menggoncangkan keyakinannya dalam integritas kerajaan. Sekelompok intelektual yang

---

<sup>11</sup> Lihat M. Syafii Anwar, "Kemalisme dan Islam Sebuah Kaleidoskop," dalam *Ulumul Qur'an*, 1, 3, 1989, 86.

<sup>12</sup> Lihat Simon, "Prelude to Reforms: Mustafa in Libya" dalam J.M. Landau (ed), *Attaturk and Modernization of Turkey* (leiden: Ej.Brill, 1984), 12.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 19.

<sup>14</sup> *Ibid.*



kehilangan harapan melindungi integritas teritorial wilayah Usmani mulai membentuk masyarakat untuk mempertahankan hak di berbagai tempat.<sup>15</sup> Dalam keadaan seperti ini, Mustafa Kemal akhirnya berkesimpulan bahwa tidak banyak yang dilakukan di Istanbul dan memutuskan untuk memulai perjuangannya dari Anatolia. Bertepatan dengan itu, pemerintah bermaksud mengirimmkan dia ke Anatolia sebagai inspektur pasukan. Ia langsung menerima saran ini dengan senang hati.<sup>16</sup> Di Anatolia, Mustafa Kemal bekerja giat untuk mewujudkan cita-citanya. Ia bekerja sama dengan para pemberontak membentuk kader-kader militer tangguh untuk sebuah kesatuan tentara nasional. Dalam pada itu, ia melihat perlunya diadakan pemerintahan tandingan di Anatolia, dan sejak itu pula ia merencanakan membentuk sebuah negara nasional Turki yang merdeka.<sup>17</sup>

Pada bulan Juni 1919, pemerintah pusat menghadiri konferensi perdamaian yang diprakarsai oleh kekuatan sekutu di Paris. Dalam konferensi tersebut Mustafa Kemal sangat kritis terhadap delegasi sultan dan membantah bahwa aspirasi rakyat harus diwakili. Perbedaan kebijakan antara Mustafa Kemal dan Sultan dalam menentukan masa depan kerajaan terus berlangsung tak terpecahkan, sehingga mengakibatkan pertikaian politik. Mustafa Kemal memperkuat posisi militernya yang berpusat di Erzurum, dan mulai mengorganisasi kegiatan-kegiatan politik untuk melawan penduduk sekutu.<sup>18</sup> Ia kemudian bergabung dengan gerakan-gerakan Perkumpulan Hak Asasi Manusia dan mengadakan berbagai kongres. Pada kongres pertamanya yang diadakan pada tanggal 23 Juli

---

<sup>15</sup> The Turkish Ministry of Press Broadcasting and Tourism, *Gazi Mustafa Kemal Atatürk...*, 44-51.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 52-53.

<sup>17</sup> Menjelang akhir tahun 1918, di Anatolia terbentuk suatu kelompok perlawanan yang terdiri atas perwira – perwira cadangan, guru – guru, pegawai, buruh, petani, nelayan. Kelompok inilah yang semula harus dilucuti oleh Mustafa Kemal berdasarkan tugas yang diberikan oleh Sultan. Namun karena yang terjadi sebaliknya, bersama dengan kelompok ini Mustafa Kemal menyusun suatu strategi baru untuk rencana menyelamatkan Turki dari kekuatan sekutu. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan.*, 814.

<sup>18</sup> Erzurum adalah ibukota Turki Timur. Ia selalu menjadi benteng militer dan digunakan sebagai benteng pertahanan Turki melawan serangkaian invasi Rusia. Mengenai Kongres Erzurum, Lihat Lord Kinross, *Ataturk A Biography of Mustafa Kemal Father of Modern Turkey* (New York: William Morrow and Company, 1965), 202-212.

1919 di Erzurum, Mustafa Kemal mengusulkan terbentuknya sebuah pemerintahan yang menggambarkan kekuatan dari kehendak rakyat. Kongres tersebut membentuk Dewan Kongres Rakyat yang memilih Mustafa Kemal sebagai presiden Dewan tersebut.<sup>19</sup>

Pada bulan Maret 1920, seratus lima puluh nasionalis Turki ditangkap di Istanbul. Tindakan ini memiliki konsekuensi politik, yaitu sebuah gerakan nasionalis Turki diorganisasi untuk melakukan perang kemerdekaan dengan Mustafa Kemal sebagai pemimpinnya. Selanjutnya atas usaha Kemal dan teman-temannya pada bulan April 1920 terbentuklah *Buyuk Minet Medjlisi* atau Majelis Nasional Agung di Ankara dan Mustafa Kemal dipilih sebagai ketuanya.

Karena kegiatan Majelis Nasional Agung dan kelompoknya dianggap ilegal, pemerintah Istanbul di bawah tekanan sekutu mengumumkan pemecatan Mustafa Kemal dari tentara dan menghukum mati pada tanggal 11 Mei 1920.<sup>20</sup> Sultan mengirim tentara untuk menangkap Mustafa Kemal dan pejuangnya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat menandatangani perjanjian Sevres pada tanggal 10 Agustus 1920 atas desakan sekutu. Perjanjian ini tidak hanya membagi wilayah Turki Usmani, tetapi juga tidak mengakui kedaulatan bagi negara Turki. Dengan demikian, maka ketegangan antara kubu Mustafa Kemal di satu pihak dengan kubu sultan yang didukung oleh pihak sekutu di lain pihak bertambah besar. Ketegangan tersebut akhirnya diselesaikan lewat adu senjata. Peristiwa ini dalam sejarah Turki dikenal dengan Perang Kemerdekaan (1919-1922).<sup>21</sup>

Kontak pertama dimulai oleh serangan sekutu yang dipelopori oleh tentara Yunani pada tahun 1920. Di sini tentara Mustafa Kemal menderita kekalahan. Pada kontak kedua, tentara Mustafa Kemal yang dipimpin oleh Kolonel Ismet berhasil menahan gempuran musuh dan memukul balik hingga mereka mundur sampai ke lembah Inonu. Kontak senjata yang paling menentukan adalah yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 1922 di bawah pemimpin Mustafa Kemal sendiri. Pada peristiwa ini, tentara sekutu dipaksa mundur jauh ke sebelah Barat.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> *Encyclopedia Britannica*, 386.

<sup>20</sup> The Turkish Ministry of Press Broadcasting and Tourism, *Gazi Mustafa Kemal Atatürk.*, 97.

<sup>21</sup> Lihat *Ensiklopedia Islam* II, 1919/1993, 814.

<sup>22</sup> Lihat *ibid.*.

Kekalahan–kekalahan yang dialami oleh tentara sekutu ditambah dengan kekalahan mereka yang telah cukup lama bertempur menyebabkan mereka pecah. Perancis segera ingin mengakui pemerintahan Mustafa Kemal, sementara Yunani dan Inggris tidak demikian. Setelah terjadi kontak senjata pada bulan September 1922 yang dimenangkan oleh Mustafa Kemal, Inggris akhirnya bersedia mengadakan gencatan senjata, yaitu pada tanggal 11 Oktober 1922. Dengan kemenangan dan keberaniannya yang cemerlang tersebut, akhirnya Turki berhasil memperoleh kembali kemerdekaannya. Lewat Majelis Nasional Agung, rakyat Turki menganugerahkan kepada Mustafa Kemal gelar *Ghazi* yang berarti pahlawan perang.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa Mustafa Kemal adalah seorang sosok pahlawan yang besar bagi bangsanya. Ia juga seorang nasionalis tulen, cerdas dan memiliki bakat kepemimpinan yang tangguh.

### **Pemikiran Tentang Hubungan Negara dan Agama**

Di kalangan umat Islam sampai sekarang sedikitnya terdapat tiga paradigma yang berkembang dalam konteks hubungan antara negara dan agama.<sup>24</sup> *Pertama*, agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*integrated*). *Kedua*, hubungan antara agama dan negara berlangsung secara timbal balik, saling melengkapi dan saling memerlukan (*symbiotic*). *Ketiga*, agama dan negara merupakan dua hal yang terpisah satu dengan lainnya (*secularistic*). Menurut Syafii Anwar, ketiga aliran tersebut, berkembang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama serta mempunyai pendukung di dunia Islam. Khusus untuk aliran ketiga meski sangat kontroversial, ternyata juga mempunyai banyak pendukung di

---

<sup>23</sup> Lihat *ibid.*. Lihat juga M. Syafii Anwar, "Kemalisme dan Islam Sebuah Kalidoskop," dalam *Ulumul Qur'an*, 1, 3. 1989, 86

<sup>24</sup> Di antara pembahasan-pembahasan tentang berbagai aliran yang terdapat di kalangan umat Islam mengenai hubungan antara Islam dan ketatanegaraan, lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikirannya*, (Jakarta: UI-Press, 1990), 1-3, Abd Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Quran*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), viii, M. Zuhri, "Sejarah Politik Islam", dalam *Tarjih*, (Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam), Jogjakarta, edisi ke-3, Januari 2002, 2. Lihat pula Bachtiar Effendi, "Kata pengantar", dalam M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), xiv-xvii.

berbagai negara, seperti di kalangan Nasionalis Arab, Indonesia dan Turki.<sup>25</sup>

Di Turki, nama Mustafa Kemal juga termasuk salah satu pendukung dari aliran ketiga ini, walaupun dengan alasan yang berbeda. Sebagaimana beberapa tokoh yang lain yang pro dengan aliran ketiga tersebut, Mustafa Kemal juga konsisten dengan pandangannya, bahwa agama dan negara merupakan dua hal yang berbeda. Baginya, agama hanya berhubungan dengan persoalan individu dan tidak ada kaitannya dengan persoalan negara.

Pemisahan antara agama dan negara ini dapat kita lihat dari usaha-usaha sekularisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal di berbagai bidang. Salah satu di antaranya adalah di bidang politik. Berbeda dengan fatwa politik tradisional Turki yang memandang bahwa kedaulatan terletak di tangan Tuhan yang dijalankan oleh Sultan atau khalifah. Bagi Mustafa Kemal yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Barat berpandangan bahwa kedaulatan harus berada di tangan rakyat. Ide ini diterima oleh Majelis Nasional Agung pada tahun 1920. Setahun kemudian disusun konstitusi baru dan pasal 1 menjelaskan bahwa kedaulatan adalah milik rakyat. Dengan demikian yang berdaulat di Turki bukan lagi sultan, tetapi rakyat.<sup>26</sup> Selanjutnya dengan alasan fakta sejarah umat Islam, Mustafa Kemal mengusulkan agar dua fungsi yang dipegang oleh sultan Turki, yakni fungsi spiritual dan fungsi temporal dipisahkan. Kemudian, Mustafa Kemal mengusulkan agar jabatan sultan dengan kekuasaan temporal yang ada padanya dihapuskan saja untuk menghindari adanya dualisme pada kekuasaan eksekutif. Yang dipertahankan adalah jabatan khalifah dengan kekuasaan spiritualnya.<sup>27</sup> Ini berarti Mustafa Kemal menghendaki agar kekuasaan sultan Turki, dalam hal ini khalifah benar-benar hanya menyangkut bidang keagamaan saja, dan tidak perlu mencampuri urusan-urusan ketatanegaraan.

Upaya lain yang dilakukan oleh Mustafa Kemal adalah menghilangkan institusi-institusi keagamaan yang ada di dalam pemerintahan. Pada tahun 1924 Biro Syaikh a-al-Islam dihapuskan, demikian pula Kementerian Syari`at juga dihapuskan. Hukum syari`at dalam soal perkawinan

---

<sup>25</sup> M. Syafi`i Anwar, "Idealisme Islam, Realitas Politik, dan Dimensi Kebangsaan." Dalam harian *Republika*, 29 Januari 1993.

<sup>26</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan.*, 149.

<sup>27</sup> Lihat, *Ibid.*, 150.

digantikan oleh hukum Swiss. Perkawinan dilakukan bukan lagi menurut syari`at tetapi menurut hukum sipil. Wanita mendapat hak cerai yang sama dengan kaum pria. Dengan meninggalkan hukum syari`at dan hukum adat, Undang-undang baru juga dibuat seperti hukum dagang, hukum pidana, hukum laut, hukum obligasi dan lain-lain. Hukum-hukum tersebut diambil dari hukum Barat.<sup>28</sup> Untuk mengurangi keterkaitan masyarakat terhadap tradisi keagamaan, pada tahun 1925 semua perkumpulan tarekat dihapuskan.<sup>29</sup> Bersamaan dengan itu pembentukan organisasi sosial dan politik yang berdasarkan agama juga dilarang seperti partai Islam, partai kristen, dan sebagainya.

Sekularisasi di bidang pendidikan ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Penyatuan pendidikan pada tahun 1924. Seluruh sekolah-sekolah diletakkan di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan. Madrasah-madrasah ditutup untuk diganti oleh sekolah yang akan membina imam dan khatib. Di Universitas Istanbul didirikan Fakultas Ilahiyat. Selanjutnya pendidikan agama ditiadakan di sekolah-sekolah.<sup>30</sup> Pendidikan agama menjadi tanggungjawab pribadi dan keluarga. Di samping itu jumlah guru agama dikurangi dan jumlah masjid dibatasi.<sup>31</sup>

Dalam lapangan kebudayaan, Mustafa Kemal melaksanakan reformasi bahasa. Ia mengambil kebijakan Turkifikasi dengan membersihkan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 151-152. Lihat juga Niyazi Berkes, *Turkish Nationalism Western Civilization* (New York: Columbia University Press, 1959), 47.

<sup>29</sup> Penghapusan tarekat ini dikaitkan dengan pemberontakan yang dipimpin oleh kedua orang pimpinan Tarekat Naqshabandiyah yaitu Syaikh Abdullah dan Syaikh Said di wilayah timur yang didiami suku Kurdi. Pemberontakan ini sebagai reaksi terhadap gerakan penghapusan feodalisme. Pemerintah mengambil alih tanah-tanah pimpinan suku Kurdi dan Syaikh tarekat yang luas, untuk dibagikan kepada muslim Turki yang pindah dari Eropa. Lihat. Edward Montimer, *Faith and Power Politics of Islam* (New York: Random House, 1982),138-140. Menurut Shalabi, pemberontakan ini ditunggangi oleh pihak oposisi yang tidak senang terhadap kebijakan Mustafa kemal. Kemudian Mustafa kemal membubarkan partai oposisi, menangkap, membunuh, dan membuang tokoh-tokohnya ke luar negeri setelah melalui proses pengadilan. Ahmad Shalabi, *Mawsu`at at-Tārikh al-Islāmi wa al-Haqarāt al-Islāmiyah*, jilid 5, (Kairo: Maktabah al-Mahdah al-Misriyah, 1976), 568.

<sup>30</sup> Harun Nasution, *Ibid.*, 152.

<sup>31</sup> Ahmad Syalabi, *Mawsu`at at-Tārikh.*, 83.

kata-kata Arab dan Persia dari bahasa Turki. Adzan<sup>32</sup> dikumandangkan dalam bahasa Turki, Alquran diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, demikian pula khutbah Jum`at diberikan dalam bahasa Turki.

Di samping reformasi bahasa, Mustafa Kemal berusaha menghilangkan semua simbol-simbol dan upacara-upacara, baik upacara adat maupun keagamaan yang mencerminkan ketradisionalnnya. Hal ini ia lakukan dalam upayanya untuk menunjukkan kepada dunia, terutama dunia Barat bahwa Turki adalah negara yang beradab dan berbudaya tinggi sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Pada tahun 1925-an, dikeluarkan peraturan larangan pemakaian *tarbus*, menyegel semua *tekkes* (tempat pertemuan) para Darwis serta kaum tarekat, melarang praktek jampi-jampi dan klenik dalam rangka pengobatan terhadap suatu penyakit dan lain-lain.<sup>33</sup> Di sisi lain ia menyuruh mengganti pakaian-pakaian yang dianggapnya tradisional dengan pakaian Eropa pada umumnya.<sup>34</sup>

Sekularisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa di Turki, agama telah menjadi penghalang bagi kemajuan dan modernisasi. Kebijakan ini muncul sebagai kritik atau perlawanan balik terhadap kekuasaan Usmani yang menggunakan jajaran ulama dari simbol keagamaan sebagai alat legitimasi kekuasaan politiknya. Menurut Berkes, sebenarnya Mustafa Kemal sangat memahami arti dan peranan agama dalam kehidupan masyarakat Turki, terutama saat perjuangan kemerdekaan. Agama sangat berperan sebagai perwujudan suatu ekspresi spontan dalam menggalang usaha-usaha nasional. Akan tetapi pada sisi lain, Kemal juga melihat bahaya fanatisme agama yang bisa mengakibatkan bencana nasional. Ia sangat membenci praktek-praktek

---

<sup>32</sup> Azan pertama dalam bahasa Turki dikumandangkan di Masjid Santa Sophia tanggal 30 Januari 1932. Lihat Bernard Lewis *The Emergency*, 416.

<sup>33</sup> Abu al-Hasan Ali al-Husni an-Nadwi, *Pertarungan antara Alam Pikiran Islam dengan Alam Pikiran Barat*, ter. Mahjuddin Asaf (Bandung: al-Ma`arif, 1993), 60-61. Lihat pula Sabri M. Akural, dalam J.E. Landau (ed), *Attaturk and Modernization of Turkey*, 126.

<sup>34</sup> Mustafa Kemal juga mendirikan Yayasan Halk Evleri (Lembaga Rakyat). Yayasan tersebut bukanlah organisasi politik, tetapi merupakan pusat-pusat kebudayaan yang mengabdikan pada kepentingan modernisasi Turki sebagai tempat pertemuan untuk ceramah-ceramah dan bekerja dalam lapangan riset sejarah dan kesusastraan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai reformasi agama-kebudayaan, lihat August von Kral, *Kemal Atatürk's Land*, ter. Kenneth Benton (Wien-Leipzig: Wilhelm Braumuller, 1938), 31-39.

penyalahgunaan agama yang banyak dilakukan oleh golongan tradisional serta kaum ortodoks lainnya.<sup>35</sup>

Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan Dinasti Usmani tidak semata-mata terletak pada kekuatan militernya, namun juga didukung oleh kepandaian penguasa untuk menggunakan agama sebagai sandarannya. Pada awalnya penggunaan simbol dan ideologi agama ini diterima oleh rakyat bahkan memiliki daya panggil ideologis untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan Usmani. Dalam kondisi demikian, posisi ulama sangat vital sebagai pembimbing dan pengarah jalannya kekuasaan. Namun yang terjadi kemudian ulama lalu terkooptasi oleh penguasa. Dengan demikian, lama-kelamaan Dinasti Usmani secara moral, ekonomi dan militer sudah melemah, sehingga wibawa agama dan ulama juga ikut jatuh meskipun pihak sultan berusaha secara optimal menjadikan agama sebagai tiang penyangga yang terakhir.<sup>36</sup>

Dalam keadaan inilah tokoh-tokoh nasionalis tidak lagi percaya pada kekuatan retorika agama dan penggunaan simbol-simbol agama sebagai kekuatan yang mampu melindungi eksistensi bangsa Turki dari bahaya Eropa yang sudah berada di pelupuk mata. Di mata Kemal dan para pengikutnya, satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan Turki waktu itu adalah dengan cara menyingkirkan peran ulama dan merobohkan mitos 'kekhalifahan,' karena semua itu tak lebih sebagai macan ompong dan agama telah dimanipulasi untuk kepentingan sultan.<sup>37</sup>

Dengan demikian pemisahan antara agama dan negara dan kebijakan sekularisasi yang dilakukan Mustafa Kemal bukanlah ditujukan untuk memusnahkan Islam dari bumi Turki melainkan untuk menghapuskan peran ulama yang dipandang tidak cakap dan tidak mampu memberikan keamanan dan harga diri pada bangsa Turki terutama setelah Turki ternyata kalah dalam perang dunia I. Kekalahan Turki yang tergabung bersama Jerman ini telah menimbulkan *shock* karena sebelumnya mereka memandang dirinya sebagai kekuatan yang paling besar di atas bumi yang

---

<sup>35</sup> Nizyazi Berkes, *The Development of Secularism in Turkey*, (Montreal: McGill University Press, 1964), 12. Bandingkan dengan M. Syafi'i Anwar, "Kemalisme dan Islam Sebuah Kaleidoskop," dalam *Ulumul Qur'an*, 1, 3, 1989, 86.

<sup>36</sup> Komaruddin Hidayat, "Kata Pengantar" dalam Binnaz Toprak, *Islam dan Perkembangan Politik di Turki*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999), xxi-xxii.

<sup>37</sup> *Ibid.*

tentaranya tidak hanya terdiri dari manusia melainkan juga para malaikat dan Allah sendiri.<sup>38</sup>

Sebagai seorang nasionalis dan pengagum peradaban Barat, Mustafa Kemal tidak menentang Islam. Baginya Islam adalah agama yang rasional dan perlu bagi umat manusia. Tetapi agama yang rasional itu telah dirusak disalahgunakan oleh tangan-tangan manusia sehingga menyebabkan terjadinya bencana nasional. Oleh karena itu agama perlu dirasionalkan<sup>39</sup> agar bisa menjadi sumber pencerahan bagi manusia serta mampu membebaskan rakyat dari kebodohan menuju kemajuan. Sebagaimana pernah diungkapkannya pada tahun 1923, pada waktu memberikan sambutan pada persidangan Majelis Agung Nasional:

“Agama Kita adalah salah satu dari agama yang paling logis dan wajar dan karena itu menjadi agama yang paling terakhir. Untuk itu agama haruslah sesuai dengan kearifan, ilmu pengetahuan dan logika. Agama kita sesuai sekali dengan semuanya.”<sup>40</sup>

Penghapusan sistem kesultanan adalah dalam rangka membebaskan Islam dari ikatan-ikatan tradisional yang tidak rasional dan memberikan kerangka untuk menginterpretasikan Islam agar sesuai dengan kehidupan modern. Pada saat yang sama, liberalisasi agama ini adalah sebagai alat untuk reformasi. Kemal yakin bahwa hak interpretasi agama tidak boleh dimonopoli oleh kelompok tertentu. Melalui reinterpretasi, Islam akan mengalami pencerahan dan humanisasi.<sup>41</sup>

Agama, dalam pandangan Mustafa Kemal tidak boleh disalahartikan atau digunakan sebagai alat untuk menindas kemodernan atau pemikiran-pemikiran ilmiah. Mengikuti fatwa-fatwa dengan menghilangkan metode-metode ilmiah tidak bisa dibenarkan. Apabila antara akal dan wahyu saling bertentangan, maka penemuan akal yang harus diterima sedangkan wahyu harus diinterpretasikan kembali agar sesuai antara pemikiran dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian agama bisa terus memiliki pengaruh yang menguntungkan bagi tuntutan zaman. Kefanatikan terhadap agama jelas

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Niyazi Berkes, *The Development.*, . 283-284.

<sup>40</sup> Lihat, M. Syafi'i Anwar, "Kemalisme dan Islam Sebuah Kaleidoskop," dalam *Ulumul Qur'an*, 1, 3, 1989, 86.

<sup>41</sup> Lihat August von Kral, *Kemal Atatürk's Land.*, 484.



menghalangi kemajuan masyarakat. Bila hal itu didukung oleh kekuasaan negara, jelas akan menjadi penghalang terhadap perubahan dan inovasi-inovasi penting.<sup>42</sup>

Dalam pandangan Kemal, Islam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan rakyat Turki. Akan tetapi menjaga Islam terhadap penyalahgunaan politik adalah hal yang penting. Oleh karena itu, menghapuskan kesultanan tidak berarti menghapuskan agama Islam dari kehidupan rakyat Turki. Tujuan dari sekularismenya adalah untuk menghilangkan belenggu agama dan mengeluarkan agama dari seluruh persoalan hukum dan politik. Di sisi lain, juga bertujuan untuk menjadikan agama sebagai alat modernisasi dan pencerahan.

Mustafa Kemal sebenarnya bukanlah sekularisasi yang betul-betul sekuler. Hal ini menurut Harun Nasution, walaupun hukum syari'at telah dihapus pemakaiannya dan pendidikan agama dikeluarkan dari kurikulum sekolah, tetapi di Republik Turki Mustafa Kemal masih mengurus soal agama melalui Departemen Urusan Agama, sekolah-sekolah Pemerintah untuk imam dan khatib, dan Fakultas Ilahiyat dari perguruan tinggi Negara, Universitas Istanbul.<sup>43</sup>

### **Dampak dan Reaksi atas Pemikiran dan Pembaharuan Mustafa Kemal**

Atas upaya-upaya sekularisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal, berbagai reaksi muncul, baik yang bernada setuju maupun yang menentangnya. Dari dalam negeri Turki muncul satu partai oposisi pemerintah, yaitu *Progressive Republican Party* yang dipimpin oleh Rauf dan Refet. Partai ini muncul segera setelah Majelis Nasional Agung menerima usul Mustafa Kemal menghilangkan jabatan khalifah, Biro *Syaikh al-Islam*, Kementerian Urusan Agama, dan penyatuan pendidikan di bawah atap Kementerian Pendidikan.<sup>44</sup> Selanjutnya muncul reaksi dari kaum *dervis* dan kalangan persekutuan tarekat serta dari masyarakat suku Kurdi pada tahun 1921. Reaksi ini muncul dalam bentuk pemberotakan total terhadap kekuasaan pemerintah republik. Gerakan pemberontakan ini akhirnya berhasil dipadamkan oleh Mustafa Kemal setelah mengerahkan kekuatan militer penuh. Syaikh Said, salah seorang pemimpin Tarekat *Naqshaban-*

<sup>42</sup> *Ibid.*, 242-243.

<sup>43</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan.*, 152.

<sup>44</sup> Bernard Lewis, *The Emergency.*, 1961), 268-269.

diyah yang memimpin pemberontakan tersebut berhasil ditangkap oleh pemerintah dan dijatuhi hukuman mati oleh suatu Mahkamah Militer yang dibentuk khusus untuk itu dipimpin oleh Kazim Karabekir pada tahun 1925.<sup>45</sup>

Reaksi juga muncul dari luar Turki dengan mengambil bentuk munculnya keresahan pada sebagian besar bangsa-bangsa Muslim yang melihat Turki bergeser memihak ke Barat dan meninggalkan bangsa-bangsa Muslim. Kelompok yang besar perhatiannya terhadap masalah ini adalah adalah umat Islam dari anak benua India yang diwakili oleh dua orang tokoh populernya, yakni Syed Ameer Ali dan Aga Khan pada tahun 1923. Kedua tokoh ini melayangkan surat terbuka kepada pemerintah Republik Turki dalam bentuk himbauan. Demi kepentingan persatuan dan kesatuan umat Islam dunia dan demi kebesaran umat Islam Turki sendiri, pemerintah Turki agar mempertimbangkan kembali keputusan menghilangkan jabatan khalifah, karena jabatan khalifah bagi pemerintah dunia Islam sejak zaman klasik telah berlaku dan penting adanya.<sup>46</sup>

Di Mesir juga muncul reaksi dengan terbitnya buku berjudul *al-Khilāfat wa al-Imāmat al-Uzmā* karya Syekh Muhammad Rasyid Ridha.<sup>47</sup> Menurut Ridha, tindakan Mustafa Kemal dan para pendukungnya di Turki merugikan umat Islam.<sup>48</sup> Bagi Ridha, sistem kekhalifahan adalah suatu kemestian yang harus diterima bagi pemerintahan Islam berdasarkan fakta-fakta sejarah umat Islam. Pada khalifahlah kekuasaan temporal dan spiritual berada dan umat Islam wajib mentaatinya. Oleh karena itu lembaga tersebut harus dipertahankan.<sup>49</sup> Selain berkaitan dengan kekhalifahan di atas, Rasyid Ridha juga menentang usaha Mustafa Kemal untuk menterjemahkan Alquran ke dalam bahasa Turki. Baginya, Usaha menterjemah-

---

<sup>45</sup> Lihat *Ibid.*, 266. Lihat juga Edward Mortimer, *Faith and Power.*, 127-128.

<sup>46</sup> Bernard Lewis, *The Emergency.*, 263. Lihat juga Edward Mortimer, *Ibid.*, 124-125.

<sup>47</sup> Menurut Hamid Enayat, Buku tersebut diterbitkan pada malam penghapusan jabatan khalifah. Lihat Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought*, (London: Macmillan Press, 1982), 70; sedang menurut E. I. J. Rosenthal, buku tersebut diterbitkan pada tahun 1923. Lihat E. I. J. Rosenthal, *Islam in the Modern National State*, (Leiden: E. J. Brill, 1981), 82.

<sup>48</sup> Lihat *ibid.*

<sup>49</sup> Lihat *ibid.*, 77.

kan Alquran dalam bahasa apapun adalah merupakan pelecehan terhadap kesucian Alquran itu sendiri. Oleh karena itu, hal itu wajib dicegah.<sup>50</sup>

Pandangan Rasyid Ridha tersebut mendapat sambutan yang cukup ekstrim dari kelompok Ikhwan al-Muslimin.<sup>51</sup> Secara tegas, Hasan al-Banna (1906-1941) menyatakan bahwa semua anggota Ikhwan al-Muslimin<sup>52</sup> mengarahkan langkah, cita-cita, dan pekerjaan mereka kepada terbentuknya pemerintahan Islam dengan upaya mengembalikan jabatan dan fungsi khalifah pada posisi yang seharusnya.<sup>53</sup>

Dalam pada itu, tepatnya tiga belas bulan setelah pengumuman penghapusan khalifah di Turki, seorang ulama Mesir jebolan al-Azhar dan Hakim al-Manşūrah menerbitkan satu buku yang berjudul *al-Islām wa Uşūl al-Hukm*. Dari sudut pandang Syekh Ali Abdul Raziq, penulis buku tersebut, menyimpulkan bahwa tidak ada dasarnya di dalam Islam tentang keberadaan khalifah dalam arti pemimpin spiritual yang wajib ditaati oleh umat Islam.<sup>54</sup> Senada dengan pendapat tersebut Muhammad Iqbal membicarakan tentang penghapusan khalifah oleh Mustafa kemal dengan alasan: *pertama*, tidak ada kesepakatan secara utuh dari seluruh umat Islam tentang pemegang jabatan tersebut. *Kedua*, orang-orang Turki pasca penghapusan khalifah tetap konsisten pada spirit Islam dan yang *ketiga*, karena alasan-alasan tertentu, orang-orang Turki berkeinginan melepaskan tanggung jawab internasionalnya.<sup>55</sup>

Reaksi terhadap sekularisasi juga muncul pada periode setelah Mustafa kemal. Hal itu tidak lain karena ternyata tindakan Mustafa kemal penghapusan khalifah di negerinya membawa persoalan besar di tengah-tengah dunia Islam. Reaksi tersebut terlebih merupakan kekhawatiran atas

<sup>50</sup> Lihat E. Mortimer, *Faith and Power.*, 132.

<sup>51</sup> *Ikhwan al-Muslimin* adalah organisasi keagamaan dan politik Islam yang kuat dan diperhitungkan oleh pemerintah di Mesir. Kelompok ini didirikan pada tahun 1928 di Mesir oleh Hasan al-Banna. Lihata Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara* ., 145.

<sup>52</sup> Menurut catatan, Ikhwan al-Muslimin memiliki anggota lebih dari 500.000 orang yang diorganisir secara ketat dan rapi ke dalam 200 cabang di Mesir. Lihat. *Ibid*.

<sup>53</sup> Lihat Ismail al-Kilani, *Sekularisme, Upaya Memisahkan Agama dari Negara*, ter. Kathur Suhardi (Jakarta: al-Kauthar, 1992), 198.

<sup>54</sup> Lihat Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought, The Response of the Shi'i and Sunni Muslims Twentieth Century*, (London: The Macmillan Press, 1982), 62-63.

<sup>55</sup> Lihat *Ibid.*, 62.

Islam dan umat Islam di negeri baru itu khususnya, dan negara-negara Islam di dunia pada umumnya. Hal itu bisa dimengerti, karena Turki terlanjur telah dianggap sebagai negara Muslim yang berhasil menyelamatkan kredibilitas dan kewibawaan pemerintah bangsa-bangsa Muslim dari ancaman negara-negara Eropa. Ia juga dianggap sebagai pemimpin bangsa-bangsa Muslim berkaitan dengan jabatan khalifah yang diakui berada pada diri sultan-sultan Turki pasca imperium daulat Abbasiyah.<sup>56</sup>

Mengomentari dampak akibat pembaharuan Mustafa Kemal, Nurkholis Madjid menyatakan bahwa tindakan bangsa Turki di bawah Mustafa Kemal yang telah menukar huruf Arab ke dalam bahasa Latin berakibat cukup fatal dilihat dari kesinambungan dan kelestarian budayanya. Tindakan tersebut telah menyebabkan para generasi baru Turki tidak lagi dapat membaca warisan budaya dan sastra mereka sendiri. Akibatnya semuanya harus dimulai dari titik nol, sementara mereka harus ditantang untuk mengejar ketertinggalannya. Berbeda dengan kasus Jepang yang tetap memelihara kesinambungan dan kelestarian budaya. Jepang akhirnya menjadi bangsa timur yang modern dan tetap otentik. Dan jika di Jepang kemodernan telah berhasil dicerna menjadi kejepangan sehingga tidak dirasakan sebagai barang asing yang terolak oleh sistem budaya asli, di Turki kemodernan itu sampai sekarang, menurut banyak ahli, masih tetap dirasakan sebagai barang asing yang dirasakan tidak cocok dengan sistem budaya sendiri.<sup>57</sup> Hal senada juga diungkapkan Komaruddin Hidayat.<sup>58</sup>

## Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Mustafa Kemal adalah seorang pembaharu Turki yang pertama kali menerapkan sistem pemerin-

---

<sup>56</sup> Baca antara lain tulisan Ismail al-Kilani, *Sekularisme, Upaya Memisahkan Agama dari Negara*. 183-184. Lihat juga Binnaz Toprak, *Islam and Political Development in Turkey*, 43.

<sup>57</sup> Nurkholis Madjid, "Kecinambungan Budaya," *Tekad*, 21 Juni 1999, 4

<sup>58</sup>Menurutnya, modernisasi yang berlangsung di Turki di bawah komando Kemal Atatürk, telah menelan ongkos sosial dan budaya yang amat mahal. Masyarakat Turki mengalami kepribadian terbelah (*split personality*). Revolusi kebudayaan dan politik yang dipelopori oleh Kemal Atatürk dengan menjadikan Eropa sebagai kiblatnya telah mengakibatkan hilangnya nilai-nilai tradisional Turki yang paling otentik dan sangat kaya. Komaruddin Hidayat, *Islam dan Perkembangan Politik di Turki*, xxii-xxiii.

tahan Barat di dunia Muslim dan dikenal sebagai Bapak pendiri Republik Turki Modern. Dalam rangka menciptakan sebuah negara modern, ia memisahkan agama dalam kehidupan politik, atau dikenal dengan "seku-larisasi". Hal ini dilakukan karena pengalaman sejarah agama telah menjadi penghalang bagi kemajuan dan modernisasi. Ini terjadi karena agama telah disalahgunakan oleh para penguasa sebagai legitimasi politiknya. Menurut Kemal, Islam adalah agama yang rasional dan perlu bagi umat manusia. Tetapi agama yang rasional itu telah dirusak dan disalahgunakan oleh tangan-tangan manusia. Oleh karena itu agama perlu diinterpretasikan kembali agar sesuai dengan tuntutan zaman dan bisa menjadi sumber pencerahan.

Reformasi Mustafa Kemal ini telah menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan, ada yang pro dan ada yang kontra. Sekularisasi telah menimbulkan dampak psikologis yang luar biasa bagi masyarakat Turki, karena sebagian besar masyarakat Turki mempunyai keterkaitan dan komitmen yang cukup kuat terhadap agamanya, bahkan sampai menjurus pada primordialisme dan fanatisme agama. Dilihat dari kesinambungan budaya, dengan menjadikan Barat sebagai model dari reformasinya, masyarakat Turki harus membayar ongkos sosial dan budaya yang amat mahal, karena telah mengakibatkan hilangnya nilai-nilai tradisional Turki yang paling otentik yang kemudian tidak bisa dikenali lagi oleh generasi selanjutnya. Di sisi lain juga harus diakui bahwa di antara sejumlah karya politiknya yang dahulu dibenci dan dihina, bahkan telah dianggap menghina Islam, sekarang keadaannya tidak demikian. Di akhir abad ke-19, bentuk negara republik dengan sistem parlementer tidak lagi dipandang sebagai bentuk negara yang tidak Islami. Demikian pula penerjemahan Alquran dan pembacaan khutbah, telah dilakukan dalam bahasa-bahasa yang berkembang di seluruh dunia.